



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

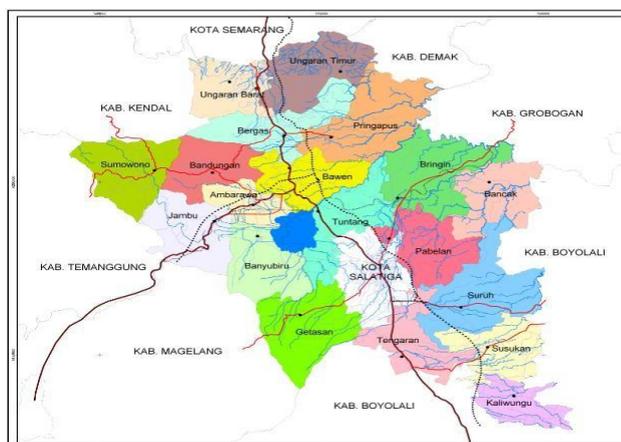
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat yang dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik.

Materi yang dimuat dalam RLPPD meliputi Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah serta Inovasi Daerah

A. Gambaran Umum.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 7 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang



Adapun batas wilayah Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung; dan
- e. Dalam : Kota Salatiga

Kabupaten Semarang dengan luas kurang lebih 1.019,27 km² (seribu sembilan belas koma dua puluh tujuh) kilometer persegi meliputi 19 Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Dan berdasarkan pada data Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah sebesar 1.088.729 jiwa, meningkat 10.814 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1.077.912. Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebesar 543.176 (49,89%) dan perempuan sebesar 545.553 (50,11%).

B. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional

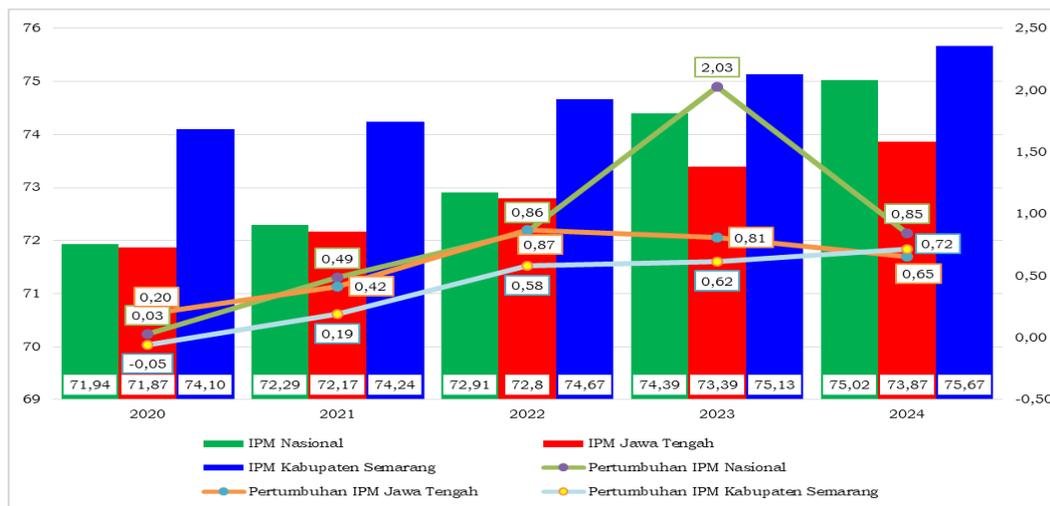
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Semarang Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,13	75,67	naik 0,72 persen
2	Angka Kemiskinan	7,17	6,96	turun 0,21 persen poin
3	Angka Pengangguran	4,05	3,73	turun 0,32 persen poin
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,74	4,73	turun 0,01 persen poin
5	Pendapatan Per kapita	56,71	60,18	naik 6,12 persen
6	Ketimpangan Pendapatan	0,388	0,359	turun 7,47 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2025

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Semarang pada rentang waktu Tahun 2020 - 2024 terus mengalami peningkatan, dari 74,10 pada tahun 2020 menjadi 75,67 pada tahun 2024. Secara persentase IPM Tahun 2024 tumbuh 0,72% atau meningkat 0,54 poin dari Tahun 2023 yang sebesar 75,13. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Semarang berada pada posisi status pembangunan manusia **kategori tinggi**.



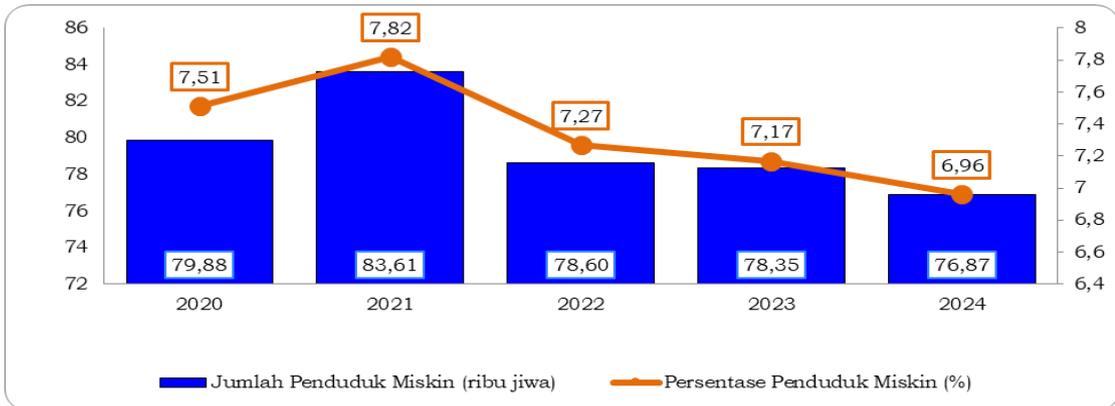
Sumber: BPS, 2025, diolah

Peningkatan IPM Kabupaten Semarang tahun 2024 didukung oleh **peningkatan pada semua komponen penyusunnya**, yaitu **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak**.

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH SP2020-LF) *)	Tahun	75,73	75,79	75,86	75,95	76,15
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,97	12,98	13,04	13,05	13,06
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,02	8,03	8,05	8,07	8,16
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP)	Rp.000	11 966	12 070	12 448	12 943	13.377
IPM *)		74,10	74,24	74,67	75,13	75,67

b. Angka Kemiskinan

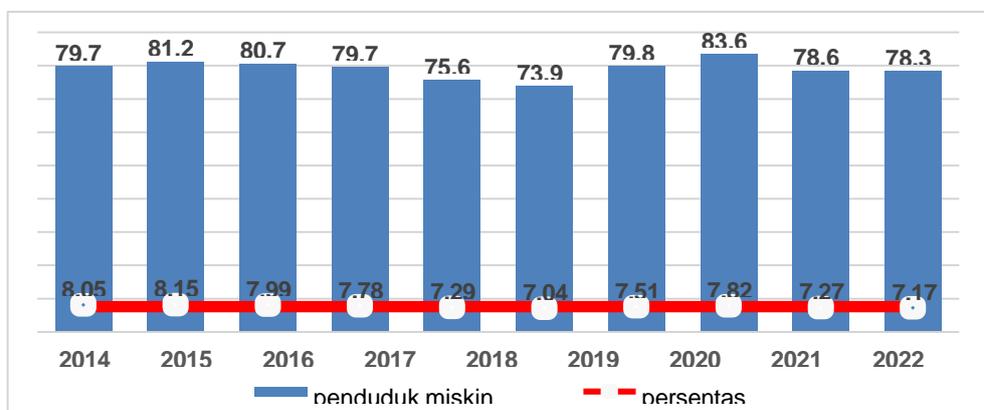
Pada rentang Tahun 2023-2024, melalui berbagai upaya kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya, berhasil **menurunkan persentase penduduk miskin** sebesar 6,96%, sehingga pada Tahun 2024 penduduk miskin menjadi 76,87 ribu jiwa atau **berkurang sebanyak 1.480 jiwa** dari Tahun 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

Persentase penduduk miskin tersebut lebih rendah jika dibanding persentase penduduk miskin di Jawa Tengah yang sebesar 10,47% dan Nasional sebesar 9,03%. Namun jika dilihat dari laju penurunan kemiskinan Tahun 2023-2024, kemiskinan Kabupaten Semarang turun sebesar 2,93%, lebih cepat daripada laju penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79%, tetapi lebih lambat daripada laju penurunan kemiskinan Nasional sebesar 3,53%.

. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, 2014 – 2023



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

c. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebesar 3,33, angka ini **turun 0,32 persen poin** dibanding tahun 2023. Tren dari Tahun 2022-Agustus 2024 TPT Kabupaten Semarang terus menurun yaitu menjadi 3,73%. Tahun 2023 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 26.136 jiwa, **berkurang 814 jiwa pada Tahun 2024** atau menjadi **25.322 jiwa**. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 sampai 4 orang pengangguran

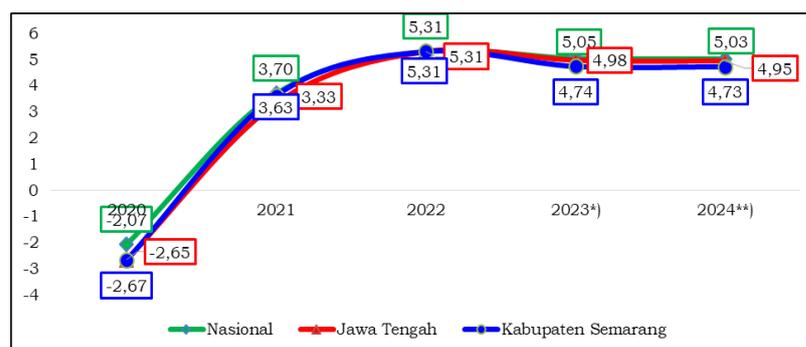
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Semarang Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024, diolah

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2024 mencapai 4,73% **melambat 0,01 persen poin** dari Tahun 2023. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar 4,95% dan Nasional sebesar 5,03%. Dan jika dibandingkan sembilan kabupaten/kota sekitar, pertumbuhan Kabupaten Semarang berada pada urutan ke delapan, seperti terlihat pada grafik berikut :



e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan PDRB per kapita digunakan sebagai perkiraan rata-rata pendapatan penduduk per kapita per tahun, yang menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Berikut kondisi PDRB per Kapita Kabupaten Semarang Tahun 2024:

Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2023

Komponen	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022*	Realisasi Tahun 2023**
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	51.796,32	56.640,12	61.284,18
Jumlah Penduduk (Jiwa) ¹	1.061.546	1.071.236	1.080.648
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku			
• Nilai (Juta Rupiah)	48,79	52,87	56,71
• Perkembangan (%)	4,56	8,36	7,26

Sumber BPS Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2023 No. 01/02/3322/Th. V, 29 Februari 2024

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat sementara

Tahun 2021-2023 Merupakan Proyeksi Penduduk Kabupaten Semarang Hasil SP2020

Rentang Tahun 2021-2024 PDRB per Kapita Kabupaten Semarang menunjukkan **perkembangan positif** yaitu meningkat Rp33.860.000,00 Tahun 2021 menjadi **Rp38.109.000,00 per kapita per tahun Tahun 2024.**

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

TAHUN	PDRB PER KAPITA ADHB		PDRB PER KAPITA ADHK 2010	
	NILAI (juta rupiah)	PERTUMBUHAN (%)	NILAI (juta rupiah)	PERTUMBUHAN (%)
2020	46,67	-1,33	33,00	-2,85
2021	48,79	4,54	33,86	2,61
2022	52,87	8,36	35,34	4,36
2023*)	56,71	7,26	36,69	3,83
2024**)	60,18	6,16	38,10	3,86

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2025 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

f. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien Gini (Gini Ratio) menjadi ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Dengan ketentuan bahwa koefisien <0.4 artinya tingkat ketimpangan rendah; koefisien 0,4-0,5 artinya tingkat ketimpangan sedang; dan koefisien >0,5 artinya tingkat ketimpangan tinggi. Pada tahun 2024 angka **Gini Rasio Kabupaten Semarang** adalah **0,359** sehingga termasuk dalam **kategori tingkat ketimpangan rendah**

C. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar yaitu meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas dan Sosial.

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,31%
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	79,28%

NO	URUSAN	N0	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,86%
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	48,96%
2	Kesehatan	1	Jumlah Daya Tampung RS Negeri dan Swasta rujukan Kabupaten Semarang 2024	0,76
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	100,00%
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00%
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00%
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00%
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00%
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,33%
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,10%
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	92,47%

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 %
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 %
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	100,00%
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	NIHIL Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	NIHIL Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,62%
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	99,32%

NO	URUSAN	N0	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100,00 %
		7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	87,92%
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	NIHIL
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	100,00%
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	78,88%
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	17,99%
		5	Jumlah Perumahan yang sudah atau sedang dibangun dilengkapi PSU	100,00%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	99,77%
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00%
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%

NO	URUSAN	N0	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	CAPAIAN
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	0,15
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	87,85%
		7	Rata-rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,14 Menit
6	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,00%
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00%

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

D. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

1) Hasil EPPD

Berdasarkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EPPD) Tahun 2023 maka predikat LPPD adalah "**Sedang**" dengan skor **3,1605**.

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum dapat ditampilkan karena sampai saat ini masih dalam proses penilaian, sehingga data yang ditampilkan masih menggunakan data hasil audit sampai dengan tahun 2023. Pada 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang secara terus menerus mendapat **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dan apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD di tahun 2023, maka nilai capaian tersebut terealisasi **100%**.

E. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Anggaran Daerah

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Semarang.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasikan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dikelola melalui APBD Kabupaten Semarang Tahun

Anggaran 2024 adalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

NO	URAIAN	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024		%
		RENCANA	REALISASI*)	
1	Pendapatan Asli Daerah	613.009.836.250	597.793.416.296	97,52
2	Pendapatan Transfer	1.964.012.877.000	1.968.562.320.603	100,23
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	126.413.303	-
TOTAL		2.577.022.713.250	2.566.482.150.202	99,59

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang Tahun 2025

Catatan : *) Tahun 2024, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 613.009.836.250,00 dapat direalisasikan sebesar **Rp 597.793.416.296,00** atau **97,52%** artinya Rp10.540.563.048 dari rencana.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 direncanakan berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target yang direncanakan sebesar Rp 1.964.012.877.000,00 dengan capaian realisasi sebesar **Rp 1.968.562.320.603,00** artinya lebih tinggi Rp3.715.794.870.635,00 atau **100,23%**.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran

2024 tidak ada target yang direncanakan tetapi ada realisasi sebesar **Rp98.711.116** adalah pendapatan hibah- sumbangan pihak ketiga/sejenis yang merupakan setoran dari Pihak ketiga yang tidak dapat teridentifikasi dan tidak ada konfirmasi dari penyetornya setelah penelusuran optimal dari BKUD melalui Bank Jateng atau kanal pembayaran yang lain.

2) **Belanja Daerah**

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan serta jenis belanja.

Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah dibagi dalam kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pada belanja operasi memuat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Pada belanja modal memuat belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan jaringan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Hal tersebut berbeda dengan struktur APBD Tahun 2020 yang masih berpedoman pada PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian belanja tidak terduga dan belanja transfer yang memuat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja Daerah Kabupaten Semarang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 jika dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp112.360.015.850,00 dari semula Rp2.641.576.672.400,00 menjadi **Rp2.753.936.688.250,00** sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024		%
		Anggaran	Realisasi*)	
1.	Belanja Operasi	2.080.592.641.916	1.904.225.901.479	91,52
2.	Belanja Modal	265.868.842.334	254.618.371.097	95,77
3.	Belanja Tidak Terduga	6.969.000.000	5.246.172.000	75,28

4.	Belanja Transfer	400.506.204.000	397.230.255.833	99,18
	Total Belanja	2.753.936.688.250	2.561.320.700.409	93,01

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang tahun 2024

Catatan: *)tahun 2024, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan

Dari seluruh jenis belanja yang dianggarkan, realisasinya tidak ada yang 100% dan secara keseluruhan realisasi belanja adalah **93,01%** dari anggaran yang disediakan, dengan capaian output mendekati yang ditargetkan dalam setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.080.592.641.916,00 dapat terealisasi sebesar **Rp1.904.225.901.479,00** atau sebesar **91,52%**.

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Rencana	Realisasi *)	%
1.	Belanja pegawai	1.190.685.168.328	1.068.724.971.720	89,76
2.	Belanja Barang dan Jasa	770.803.622.138	718.562.288.549	93,22
3.	Belanja Hibah	113.036.301.450	110.965.911.210	98,17
4.	Belanja Bantuan Sosial	6.067.550.000	5.972.730.000	98,44
	Jumlah	2.080.592.641.916	1.904.225.901.479	91,52

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang tahun 2025

Catatan: *)tahun 2024, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan

b. Belanja Modal

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 240.230.859.915,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi **Rp. 265.868.842.334,00** atau **94,14%**.

Rencana dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024*)

No	Uraian	Penetapan APBD TA. 2024	Perubahan APBD TA. 2024*	Bertambah/ (Berkurang)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.603.276.465	67.148.453.069	16.545.176.604	32,70
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.431.465.850	41.473.619.450	(7.957.846.400)	(16,10)
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.248.720.600	146.541.269.070	7.292.548.470	5,24

No	Uraian	Penetapan APBD TA. 2024	Perubahan APBD TA. 2024*	Bertambah/ (Berkurang)	%
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	702.123.000	10.495.668.745	9.793.545.745	1.394,85
5.	Belanja Modal Aset Lainnya	245.274.000	209.832.000	(35.442.000)	(14,45)
TOTAL		240.230.859.915	265.868.842.334	25.637.982.419	10,67

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang, Tahun 2025

*data perubahan APBD menggunakan data perubahan atas penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Belanja Modal terealisasi sebesar 95,77% dengan sisa sebagian karena efisiensi dan sisa lelang.

c. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga dengan pagu sebesar Rp6.969.000.000,00 terealisasi sebesar **Rp5.246.172.000,00** atau **75,28** %. Penggunaan Belanja Tidak Terduga ini untuk membiayai kondisi darurat dan mendesak.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan untuk 208 desa di Kabupaten Semarang, dengan anggaran sebesar Rp400.506.204.000,00 terealisasi sebesar **Rp397.230.255.833,00** atau **99,18%**.

Rencana dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024*)

No	Uraian	Perubahan APBD TA 2024	Realisasi	%
1.	Belanja Bagi Hasil	35.202.055.000	33.028.457.833	93,83
2.	Belanja Bantuan Keuangan	365.304.149.000	364.201.798.000	99,70
Jumlah		400.506.204.000	397.230.255.833	99,18

Sumber: BKUD Kabupaten Semarang tahun 2025

Catatan: *)tahun 2024, angka realisasi sebelum audit laporan keuangan

F. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara optimal dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terus berupaya mendorong tumbuhnya inovasi daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut daftar program inovasi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024:

DAFTAR INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	POINBANG (Pojok Inovasi Penelitian dan Pengembangan)
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Gardu Serasi Nangkis (Gerakan Terpadu Sinergi dan Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang)
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PENAKMAS (Pelayanan Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi)
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Elektronik Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
5.	Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Susukan)	CETING MESEM (Cegah Stunting dengan Menu Seimbang)
6.	Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Bergas)	CETING EMAS (Cegah Stunting dengan GERMAS)
7.	Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Bancak)	BAPAK AKTING (Bancak Pandai Kreatif Aktif Cegah Stunting)
8.	Dinas Kesehatan	BAKMI JETIS DAN BAKMI LUDES
9.	Dinas Kesehatan	Strategi Pengintegrasian Komunikasi Pelayanan Ambulans Melalui Digitalisasi Dan Call Center (112) Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
10.	Dinas Kesehatan	PETISI OPD ASIK" untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten Semarang
11.	Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas Bancak)	Posyandu ODGJ TERSAYANG (Terabaikan Saat Jiwanya Terguncang)
12.	Dinas Pariwisata	APIKS (Aplikasi Pariwisata ter-Integrasi Kabupaten Semarang)
13.	Dinas Pariwisata	Inovasi Pintu Masuk Otomatis Daya Tarik Wisata (DTW) Dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
14.	Dinas Pariwisata	Gedongsongo Travel Mart - Inovasi Public Private Partnership Penyelenggaraan Temu Usaha Buyer dan Seller Pariwisata
15.	Dinas Pariwisata	Inovasi Penyelenggaraan Desa Wisata Berkelanjutan
16.	Dinas Pariwisata	Inovasi Efisiensi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian di Daya Tarik Wisata dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
17.	Dinas Lingkungan Hidup	SINGAREMPAH (Sistem Informasi Penanganan dan Retribusi Sampah)
18.	Dinas Lingkungan Hidup	Budidaya Maggot
19.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIMASPULKAM (Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang)
20.	Dispendukcapil	Desa GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
21.	Dinas Perhubungan	ANGKRINGAN (Angkutan Rintisan Daerah Pinggiran, Daerah Perbatasan)
22.	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Pemberian "INSULIN" (Insentif untuk Linmas) sebagai Apresiasi dan Motivasi bagi Anggota Linmas dalam Melaksanakan Pelayanan Dasar Publik Trantibumlinmas di Kabupaten Semarang
23.	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	TARKOMAH OTW (anTAR seKO ruMAH sakit, Obat Teko deWe) Pengembangan

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu
24.	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	JALA CETING (Jejaring Layanan Cegah Stunting)
25.	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	PILOT KEREN (Pemberian Informasi Layanan Obat oleh apoteker online)
26.	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	SRI OBATIN TEH JIWA (Sistem Reminder Obat rutin TB Epilepsi HIV JIWA)
27.	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	JAMILAH CEKATAN (Jejaring Ibu Hamil Langkah Cegah KematiAN)
28.	RSUD dr. Gondo Suwarno	PESAN SEHAT (Pemeriksaan Kesehatan Terpadu)
29.	RSUD dr. Gondo Suwarno	SIDARA SEHAT (Siap Datang Kerumah Anda)

G. Penutup

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) pada Tahun 2024 ini pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 yaitu "BERSATU, BERDAULAT, BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI), DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINNEKA

TUNGGAL IKA.". Upaya tersebut dilakukan dengan mengarahkan seoptimal mungkin berbagai sumber daya daerah agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan keterbatasan yang dihadapi, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi dalam menghadapi permasalahan, keterbatasan dan tantangan, Pemerintah Kabupaten Semarang terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 ini disampaikan, semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, sekaligus dapat dijadikan bahan

evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

BUPATI SEMARANG

ttd

H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH